

EDISI : Rabu, 02 Oktober 2019

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN:
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KABUPATEN BULELENG

RESUME BERITA**EDISI :Rabu, 02 Oktober 2019**

NO	NAMA MEDIA	JUDUL BERITA	RESUME	KET.
1	FAJAR BALI	WTP 5 Kali Beruntun, Raih Penghargaan Menkue	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pengelolaan keuangan daerah, telah lima kali diraih secara berturut-turut oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng. Berkat prestasi tersebut, Pemkab Buleleng diganjar penghargaan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penghargaan tersebut diserahkan oleh kepala kantor wilayah direktorat jendral perbendaharaan provinsi bali, Tri Budhianto kepada Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana,ST di ruang rapat Lobi Kantor Bupati Buleleng, Selasa (1/10) kemarin.	
		Lovina Festival ke-8 Resmi Ditutup	Gelaran Lovina Festival ke-8 tahun 2019 yang dirangkaikan dengan kedatangan kapal-kapal wisata yang menjadi peserta wonderfull sail Indonesia ditutup secara resmi oleh staf Ahli Mentri Kemaritim Bidang pemukulan gong. Acaa penutupan juga dirangkaikan dengan penyerahan hadiah Lovina Festival. Acara penutupan diawali dengan pelepasan ratusan tukik oleh Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana,ST dan Wakil Bupati Buleleng dr. I Nyoman Sutjidra,Sp.OG didampingi kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng di bibir pantai Binaria Lovina dan dimeriahkan oleh pertunjukan Marching band sekolah dasar, tari tradisional.	
		Komisi IV DPRD Buleleng Janji Cari Solusi	Hal tersebut terungkap disaat Kondisi IV DPRD Kabupaten Buleleng melakukan sidak ke RSUD Singaraja, selasa (1/10) siang	

			kemarin. Pelaksanaan sidak komisi IV DPRD Kabupaten Buleleng yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV Ni Luh Hesti Ranita Sari bersama dengan seluruh anggota mengetahui kalau pasien yang menggunakan jaminan BPJS tidak tertanggung fasilitas ambulance utamanya pasien yang meninggal dunia.	
2	NUSA BALI	BPJS Belum Pastikan Membayar	Jumlah klaim biaya kesehatan yang diajukan pihak RSUD Buleleng, terus bertambah. Namun, pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Singaraja, belum dapat memastikan pembayaran klaim tersebut. Semua RSUD Buleleng mengajukan klaim biaya kesehatan periode Juni-Juni 2019 Rp 17 miliar. Jumlah tersebut belum bisa dilunasi oleh BPJS hingga September 2019. Kini, RSUD kembali mengajukan klaim periode Agustus mencapai Rp 23 miliar.	



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Paku Post*

Kategori : *RSUD*

Tidak Ditanggung JKN-KIS

Dewan Usul Alokasi Dana Operasional Ambulans dari APBD

Operasional ambulans di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Buleleng masih menyisakan masalah serius. Pasalnya, khusus untuk operasional mobil ambulans jenazah dan ambulans pasien setelah menjalani perawatan itu tidak masuk klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Tidak ingin masalah ini terus memberatkan keuangan di rumah sakit, DPRD Buleleng meminta pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk operasional ambulans. Selain soal alokasi dana ambulans dari APBD soal apa juga yang perlu diperjuangkan RSUD terkait memberikan atensi optimal kepada pasien miskin itu?

USULAN operasional ambulans melalui alokasi dana dari APBD itu dibedah pada rapat Komisi IV DPRD Buleleng ketika berkoordinasi dengan jajaran Direksi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD. Selasa (1/10) kemarin. Koordinasi itu selain pengenalan komposisi komisi, juga persiapan mendapatkan data terkait pembahasan Rancangan APBD Tahun 2020. Rapat koordinasi ini dipimpin Ketua Komisi IV Luh Hesti Ranitasari. Sementara dari pihak direksi dihadiri Direktur Utama (Dirut) RSUD dr. Gede Wiartana, M.Kes, dan jajarannya.

Hesti Ranitasari mengatakan, pihaknya mendapat penjelasan dari manajemen rumah sakit, bagaimana mekanisme biaya operasional mobil ambulans. Sesuai regu-

lasi, BPJS katanya hanya menanggung biaya mobil ambulans ketika pasien itu memerlukan perawatan lebih lanjut. Seperti pasien itu harus dirujuk ke rumah sakit lainnya. Sedangkan, kalau ada pasien yang sudah diperbolehkan pulang dan bagi pasien yang gagal disembuhkan alias meninggal dunia, maka pihak keluarga pasien itu yang harus menyiapkan ongkos ambulans tersebut.

Diperparah lagi, pasien itu kebanyakan kelas tiga (miskin - red), sehingga rumah sakitlah terpaksa menanggung biaya ambulans itu. "Jujur, kami sendiri sering menemukan keluhan pasien kurang mampu ketika mereka harus membayar ambulans. Mereka tahunya gratis saja. Biaya ambulans itu memang tidak ditanggung BPJS. Karena itu, pihak rumah

sakit jadi terpaksa menanggung biaya itu," ujarnya.

Politisi Partai Demokrat asal Desa Tamblang, Kecamatan Tejakula ini menambahkan, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sebab, jasa ambulans itu sangat vital untuk membantu pasien. Untuk itu, salah satu cara agar rumah sakit itu mendapatkan biaya operasional ambulans, adalah pemerintah daerah mengalokasikan anggaran melalui APBD. "Hasil diskusi ini kami tindak lanjuti melalui rapat dan koordinasi dengan eksekutif. Kami kira pemerintah perlu mengalokasikan anggaran operasional ambulans di APBD, sehingga tidak lagi membebani masyarakat miskin," katanya.

Direktur Utama (Dirut) RSUD dr. Gede Wiartana, M.Kes, mengakui permasalahan itu. Menurutnya, RSUD sejauh ini telah mengoperasikan dua ambulans jenazah plus empat unit mobil ambulans untuk pasien rujukan ke rumah sakit di luar daerah. Armada ini dinilai sudah cukup. Hanya, persoalannya biaya operasional ambulans jenazah dan ambulans pengantar pasien keluar rumah sakit itu tidak masuk klaim BPJS. Pasien sendiri sering mengeluh kesulitan ongkos ambulans. Atas situasi ini,

pihaknya terpaksa menanggung biaya ambulans itu menggunakan uang BBM kendaraan dinas di rumah sakit. "Sering, pasien itu mengeluh karena mereka jauh seperti di Gerokgak atau Tejakula. Selama ini, kami yang tanggung. Tetapi memang kalau terus-menerus rumah sakit yang menanggung biaya itu, ya pastinya jadi kewalahan. Solusinya perlu diperjuangkan oleh anggota dewan. Bagus dan diharapkan dana itu bisa dialokasikan dari APBD," katanya.

Selain masalah biaya ambulans, dr. Wiartana menyebut perlu memerhatikan kondisi pengunjung pasien di kelas III itu. Pihaknya harus menunggu keluarganya lebih dari tiga hari di rumah sakit. Berharap juga kepada dewan agar memfasilitasi persoalan itu. Misalnya, ada program membantu meringankan biaya penunggu pasien miskin di rumah sakit itu. "Dulu, pernah kami usulkan membantu penunggu pasien kelas III dengan rata-rata Rp 50.000 sampai Rp 100.000. Namun, kondisi keuangan daerah belum cukup untuk mewujudkan program itu, karena itu ditunda. Kami harap, dewan mendorong pemerintah agar berkomitmen membantu warga miskin. (mud)

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

~ BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG ~



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media :

Kategori : *sambungan*



KOORDINASI – Komisi IV DPRD Buleleng melakukan koordinasi ke **BLUD RSUD Buleleng**, Selasa (1/10) kemarin. Dari koordinasi ini, dewan mengusulkan perlu mengalokasikan anggaran untuk operasional ambulans di rumah sakit. Bali Post/kmb38



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Bali Post*

Kategori : *WTP*

Sukses Rebut Opini WTP Lima Kali

Kemenkeu-RI Berikan Penghargaan kepada Bupati PAS

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan lima kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng. Kesuksesan merebut prestasi puncak itu membuat pemerintah pusat memberi apresiasi positif kepada Pemkab Buleleng.

Ini ditunjukkan dengan penyerahan penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu-RI). Penghargaan itu diserahkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Provinsi Bali Tri Budhiyanto kepada Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana (PAS) di kantornya, Selasa (1/10) kemarin.

Tri Budhiyanto mengatakan, merebut WTP dalam pelaksa-

naan keuangan daerah tidak mudah, karena perlu kerja keras di semua lini pemerintahan yang ada. Meski demikian, pihaknya memuji Buleleng di bawah kendali dua Bupati Putu Agus Suradnyana dan Wakil Bupati dr. Nyoman Sutjitra, Sp.OG. (PAS Sutjitra). Kerja keras itu membuahkan hasil manis yang ditunjukkan dengan lima kali berturut-turut mencatatkan diri sebagai Pemkab yang meraih WTP. Bukan itu saja, yang paling penting dari raihan prestasi ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah telah terbukti akuntabilitasnya. Untuk itu, atas nama pemerintah pusat, Kemenkeu perlu memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemkab Buleleng.

Hal. 15
Dana Insentif Daerah



PENGHARGAAN WTP - Kemenkeu-RI menyerahkan penghargaan atas raihan prestasi Pemkab Buleleng yang telah merebut lima kali WTP berturut-turut.



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media :

Kategori : *Sambungan*

Dari Hal. 1

"Kerjanya belum selesai, kita harus meningkatkan kinerja pada pengelolaan keuangan," katanya.

Budhianto menambahkan, prestasi ini sejatinya menjadi "modal" dalam mendapatkan *reward* salah satunya adalah kucuran Dana Insentif Daerah (DID). Ada satu mekanisme transfer DID. Untuk mendapatkan DID itu, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah pencapaian opini WTP. Namun, ada kriteria lainnya juga yang harus dipenuhi. "Pemkab Buleleng telah memperoleh DID tersebut, jumlahnya bervariasi bisa sampai Rp 50 miliar tergantung capaiannya," katanya.

Sementara itu, Bupati Agus Suradnyana (PAS) mengatakan penghargaan ini sangat penting. Terutama untuk bisa ditingkatkan di internal bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan. Banyak manfaat juga diterima dari penghargaan ini. Salah satunya adalah sebagai daerah yang sebagian besar masih bergantung dari dana transfer pemerintah pusat, pengelolaan keuangan yang akuntabel bisa ditingkatkan jumlahnya. "Baik pada Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU) ke depan untuk bisa meningkatkan kemampuan fiskal daerah kita," katanya.

Menurut mantan anggota DPRD Provinsi Bali ini, seiring dengan kebijakan yang implementatif dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengenai keseimbangan Utara, Selatan, Timur, dan Barat sudah benar-benar terlaksana. Upaya keseimbangan ini menggunakan kemampuan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kegiatan yang mendorong pembangunan yang seimbang ini membuat Pemkab Buleleng lebih gencar lagi untuk bekerja. "Dengan momentum percepatan aksesibilitas di Buleleng, kita juga harus menyesuaikan,"

jelasnya.

Focus Group Discussion

Penyampaian penghargaan dari Kemenkeu ini juga dirangkaikan dengan *Focus Group Discussion* (FGD) Pengelolaan Keuangan Daerah yang diikuti oleh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Buleleng.

Tri Budhianto mengatakan, FGD untuk koordinasi pelaksanaan APBN di Buleleng. Ini termasuk transfer daerah yang pencairannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Singaraja. Seperti DAK fisik dan juga Dana

Desa. "Kita diskusikan apa yang terjadi dan bagaimana dinamikanya serta apa ya bisa kita lakukan untuk mengakselerasi pembangunan melalui dana transfer daerah," jelasnya.

Sementara itu, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Buleleng Gede Suyasa usai mengikuti FGD mengatakan, ke depan opini WTP

diharapkan bisa diraih kembali dengan catatan-catatan yang lebih baik. Dengan kaitan itu, FGD ini dilaksanakan untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi di waktu yang akan datang. "Juga sebagai evaluasi dan referensi untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di OPD yang mengelola dana APBN," katanya. (ad32)



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Bali Post*

Kategori : *sabar - sabar*

Empat Penyalah Guna Narkoba Ditangkap

Seorang Sopir Truk Nyambi Edarkan Sabu-sabu

Singaraja (Bali Post) -

Empat tersangka penyalahgunaan narkoba ditangkap jajaran Satuan Narkoba Polres Buleleng. Keempatnya ditangkap setelah menguasai sabu-sabu. Dari tersangka itu seorang di antaranya sehari-hari menjadi sopir truk pengangkut material yang nyambi mengedarkan barang haram narkoba itu. Tangkapan ini merupakan hasil penyelidikan, juga karena jadwal Operasi Antik 2019 beberapa waktu lalu.

Tersangka pengedar sabu-sabu yang ditangkap itu adalah Wayan Sukrayasa alias Procot (27) berasal Desa pengelatan, Kecamatan Buleleng. Dia ditangkap 20 September 2019 di rumahnya sekitar pukul 12.30 wita. Polisi menemukan barang bukti (BB) seberat 0,28 gram bruto atau 0,20 gram neto. Diduga, sabu-sabu itu dikonsumsi sendiri, yang bersangkutan juga mengedarkan narkoba kepada pelanggannya.

Tersangka berikutnya ditangkap adalah Wayan Darmayasa alias Kingkong (34) juga asal Desa Pengelatan. Seorang yang ditangkap 16 September 2019 lalu itu, polisi mendapatkan barang bukti sabu-sabu 0,06 gram bruto atau 0,05 gram neto. Tanggal 24 September 2019, polisi membekuk tersangka lainnya yakni, Made Wijaksana Arta alias Dek Wi (36) dari Kelurahan Banyuning. Saat ditangkap dari tangannya, polisi menemukan barang bukti 0,17 gram

bruto atau 0,10 gram neto. Tersangka terakhir yang berhasil digelandang adalah Luh Mas alias SGK (32) asal Kelurahan Kaliuntu. Perempuan yang sudah pernah jadi tersangka kasus serupa itu ditangkap 27 September 2019 lalu dengan barang bukti seberat 0,70 gram bruto atau 0,57 gram neto.

Kasat Narkoba AKP Made Derawi didampingi Kepala Sub Bagian (Kasubag) Humas Iptu Gede Sumarjaya seizin Kapolres Buleleng, Senin (30/9) mengatakan, selama melaksanakan 14 hari Operasi Antik pada bulan September 2019 lalu, pihaknya berhasil mencapai target menangkap tiga tersangka yang sebelumnya menjadi target operasi (TO) kepolisian. Bahkan, selama Operasi Antik, pihaknya berhasil membekuk tersangka yang sebetulnya bukan TO. Namun karena penyelidikan, dan pengembangan, sehingga tersangka non-TO itu berhasil ditangkap menjalani proses lebih lanjut.

"Ditangkapnya di lokasi berbeda dan ada hasil penyelidikan dan pengembangan di lapangan serta dari pengungkapan ini tiga TO yang ditargetkan bisa kita capai. Satu non-TO juga kita bekuk untuk proses lebih lanjut," jelasnya.

Mantan Kapolsek Sawan ini menambahkan, tersangka Wayan Sukrayasa alias Procot selain sebagai pemakai, juga menjadi pengedar sabu-sabu. Hanya, yang bersangkutan dalam menjalankan bisnis gelapnya itu menggunakan lebih dari satu jaringan. Karena itu, Made Derawi menyebut pihaknya akan mengembangkan kasus itu untuk melacak siapa jaringan tersangka Sukrayasa alias Procot itu. Selain itu, jajaran Satnarkoba berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Buleleng, agar tersangka pemakai itu diikutkan program rehabilitasi. "Yang bersangkutan itu mengedarkan. Terbukti dari paket sabu-sabu yang

dibawanya itu merupakan barang haram siap edar. Kami masih dalam untuk melacak jaringannya. Sepertinya, jaringannya tidak berbeda dengan jaringan tiga tersangka yang kami tangkap," katanya.

Tersangka Sukrayasa alias Procot di hadapan polisi mengakui perbuatannya telah menyimpan sabu-sabu itu. Pria yang kesehariannya menjadi sopir truk pengangkut material itu mengaku menggunakan narkoba untuk menambah tenaga agar kuat begadang saat bekerja hingga malam hari. Dia pun harus menyisihkan uang jerih payahnya Rp 300 ribu untuk membeli sabu-sabu per pakatnya. Tetapi, dalam situasi tertentu, stok sabu-sabu yang tidak dipakai itu dijual kembali kepada rekannya sendiri. "Saya dibawakan sabu-sabu itu langsung ke rumah. Biasanya kalau akan nyetir sampai malam pakai narkoba itu biar kuat begadang," katanya.

Sementara salah satu tersangka perempuan, Luh Mas alias SGK memilih mendundukkan kepala di hadapan penyidik. Perempuan ini menolak memberikan keterangan kepada petugas. (kmb38)

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

~ BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG ~



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Bali Post*

Kategori : *LSS*

SDN 3 Banjar Jawa Ikuti LSS Nasional

Singaraja (Bali Post) -

Lomba Sekolah Sehat (LSS) dan Berkarakter tahun ini kembali digelar. Pada perhelatan tersebut, SDN 3 Banjar Jawa menjadi duta Provinsi Bali untuk berlaga dengan SD dari provinsi lain di Indonesia. Mengawali "perjuangan" di tingkat nasional itu, Selasa (1/10) kemarin tim verifikasi LSS dan Berkarakter 2019 melakukan penilaian ke sekolah setempat. Penilaian ini dihadiri Wakil Bupati dr. Nyoman Sutjitra, Sp. OG.

Ketua tim verifikasi Abdul Rahman mengatakan, verifikasi itu merupakan tindak lanjut Lomba Seko-

lah Sehat yang telah dilaksanakan Agustus 2019 lalu. Verifikasi itu menyasar SD di sembilan provinsi di Indonesia. Salah satunya delegasi Provinsi Bali yang diwakili SDN 3 Banjar Jawa, Singaraja. Beberapa kategori penilaian yang dilakukan antara lain terdiri dari karakter dasar. "Kami melihat sekolah yang akan kami verifikasi. Seperti apakah data-data yang diperlukan sudah rampung," jelasnya.

Nyoman Sutjitra mengatakan, prestasi SDN 3 Banjar Jawa menunjukkan dunia pendidikan di Buleleng berkembang. Banyak sekolah mampu bersaing di

kaneah nasional. Torehan prestasi ini perlu diikuti sekolah lainnya, sehingga lebih banyak lagi sekolah yang mampu mencatatkan prestasinya demi kemajuan dunia pendidikan di Bali Utara. LSS itu merupakan program sangat bersinergi dengan program lainnya. Seperti kabupaten sehat. Kegiatan ini memiliki tujuan yang sama yakni menjaga lingkungan dari bahaya sampah utamanya sampah plastik. "Bagaimana nanti anak-anak itu bisa menggetoktulkannya kepada keluarganya, lingkungannya terkait perilaku hidup sehat," katanya. (kmb38)



DUTA PROVINSI BALI - SDN 3 Banjar Jawa menjadi duta Provinsi Bali dalam Lomba Sekolah Sehat (LSS) dan Berkarakter Nasional 2019. Tim verifikasi tampak melakukan penilaian di sekolah setempat, Selasa (1/10) kemarin.

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

~ BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG ~



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Bali Post*

Kategori : *Dinsos*

14.000 Peserta JKN-KIS Tak Masuk BDT Dinsos Siapkan 5.000 Kuota

Singaraja (Bali Post) -

Pemerintah pusat menonaktifkan 14.000 jiwa peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), karena data kepesertaan penduduk bersangkutan tidak masuk Base Data Terpadu (BDT). Menyusul hal itu, Dinas Sosial (Dinsos) Buleleng harus meng-cover ribuan jiwa penduduk itu agar ditanggung sebagai peserta JKN-KIS dengan Penerima Besar Iuran (PBI Daerah (APBD - red). Agar penduduk yang datanya telah dinonaktifkan itu, difasilitasi, kemudian diverifikasi Dinsos dengan solusi menyiapkan kuota JKN-KIS PBI Daerah untuk 5.000 jiwa.

Kepala Dinsos Gede Sandhiyasa, Selasa (1/10) kemarin mengatakan, pascapengumuman peserta JKN-KIS non-aktif dari PBI pusat, pihaknya sudah mensosialisasikan hal itu ke masing-masing kecamatan, desa dan kelurahan. Dinsos juga sudah meminta agar perbekel desa atau lurah melakukan verifikasi kembali data tersebut. Untuk mendapatkan data penduduk miskin yang akan



Bali Post/kmb38

Gede Sandhiyasa

diusulkan kepesertaan pada JKN-KIS PBI Daerah. Sedangkan, penduduk yang secara ekonomi dikategorikan mampu, maka diarahkan menjadi peserta JKN-KIS dengan PBI mandiri. "Setelah kami sosialisasikan namun belum ada desa atau kelurahan yang menyetorkan hasil verifikasinya. Ini harusnya disikapi serius, sehingga berapa penduduk yang bisa di-cover PBI Daerah itu bisa kita proses melalui sistem komputerisasi," katanya.

Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Desa (PMD) Buleleng itu menambahkan, pemerintah daerah menyiapkan kuota 5.000 jiwa untuk peserta JKN-KIS PBI Daerah. Selain itu, kuota sebanyak itu juga untuk menanggung penduduk yang tercecer alias belum terdaftar sebagai pemegang JKN-KIS. Ini karena sampai sekarang, di daerahnya masih ada 31.997 jiwa atau 3,90 persen penduduk yang kesehatannya wajib dijamin pemerintah. Penduduk sebanyak itu tidak seluruhnya harus ditanggung PBI Daerah (APBD - red). Tetapi, akan diverifikasi kembali untuk diarahkan masuk PBI mandiri atau diusulkan menjadi tanggungan PBI Pusat (APBN).

"Universal Health Coverage (UHC) kita sudah mencapai 96,10 persen. Masih ada sisa penduduk yang belum di-cover, sehingga kuota yang ada itu kita siapkan juga menanggung penduduk yang belum terdaftar dalam JKN-KIS. Apakah mereka nanti masuk PBI Daerah atau masuk Base Data Terpadu (BDT) PBI Pusat," jelasnya. (kmb38)

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

~ BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG ~